

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

sesuai akibat penelitian yang dilakukan sinkron dengan rumusan problem sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Donasi dana bagi yang akan terjadi pajak tunggangan bermotor buat Kabupaten Bima adalah 30% per kuartal dan hasil asal donasi dipergunakan untuk menciptakan fasilitas awam mirip sekolah, sentra kesehatan, jalan dan bangunan lainnya. berdasarkan tabel periode 2017-2021 bisa disimpulkan bahwa pemungutan pajak tunggangan bermotor pada 5 tahun berada pada keadaan naik turun tak menentu. Diketahui, tarif pajak kendaraan bermotor tertinggi di tahun 2021 merupakan Rp. 15.620.491.243. serta yang terendah di tahun 2017 sebesar Rp. 9.976.310.531.
2. Efektivitas Pajak kendaraan Bermotor (PKB) belum dilaksanakan secara optimal, karena wajib pajak belum secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. dan penetapan tujuan setiap tahun berbeda sesuai papan secara keseluruhan, sasaran terbesar merupakan di tahun 2021 sebesar Rp. 13.916.991.304 dan sudah terlaksana sebanyak Rp. 17.632.811.358.
3. Faktor pembatas dan kesulitannya ialah kurangnya pencerahan warga , yang menjadi kendala serta kesulitan bagi Samsat, yaitu kurangnya

pemahaman masyarakat ihwal pentingnya pajak kendaraan bagi rakyat pembangunan wilayah. serta upaya Samsat mengatasi hambatan tersebut memberikan pelayanan buka 2 jam di setiap kecamatan dan desa melalui kendaraan keliling Samsat, delivery dan perangkat lunak Samsat.

1.2. Saran

Adapun beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Agar pemerintah mempertahankan dan bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, karena penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTBUPPD Kabupaten Bima memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Pokok Daerah (PAD) di Kabupaten Bima dengan memperketat sanksi dan meningkatkan sistem administrasi.
2. Adapun bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan, terutama melengkapi dengan data PAD yang dapat memberikan kontribusi yang banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bima.
3. Bagi peneliti, penyusunan skripsi ini dirasa belum sempurna karena banyak kekurangan, perlu kritik yang membangun dan kontribusi dari berbagai pihak agar kedepannya peneliti dapat menyempurnakan dan mensistematisasikan penulisan skripsi dengan benar

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin idris. 2018. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- A Michael Huberman dan Matthew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1992.
- Boedijoewono, Noegroho. 2007. *Pengantar Statistik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bohari H. 2004. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi Cetakan Kelima*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dede Indra (2015), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Nagan Raya*
- Handoko. 2013. *Tim Litbang Depdagri UGM*
- Hikmah. 2017. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam*. *Jurna of govement-JOG* Volume 2, 162
- Husain Rajak A. 1997. *Tata pemerintahan republik indonesia*. Solo. CV. Aneka.
- Jurnal dministrasi public di <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi..>
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten atau Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Novi Indriani 2018. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah*.
- Pandiangan R. 2015. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Prasetya P. 2018. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.

Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi & makroekonomi*, (Fakultas Ekonom Universitas Indonesia: Jakarta, 200

Rakatitha, P.N.K., & Gayatri, G. 2017. *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah*. E-Jurnal Akutansi, 1575-1600

Ralya Savana. 2021. *Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara*.

Rompis, N.E. Ilat V, dan Wangkar A. 2015. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi SKasus Pada Samsat Airmadidi)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 No. 03.

Sri Ratnawati. 2020. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa*. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Susilawati & Riharjo. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Belanja Daerah* . Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen,

Taras & Artini S. 2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Dikabupaten Bandung Bali*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6,4

TMbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

Wahyu, Suprijanto & Pranaditya. 2017. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga*. Ekonomi- Akuntansi, Vol 7

Wayan Sudirman, kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal, Kencana Prenada Group: Jakarta 2011

Yani A. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

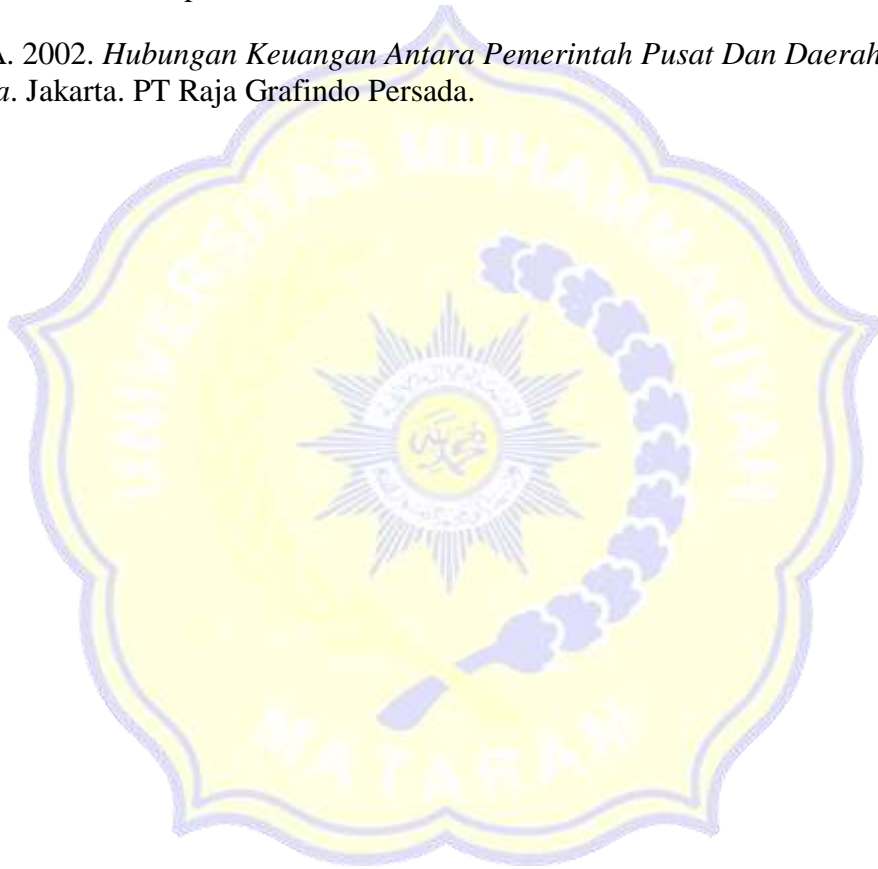






Foto bersama Kasubag Tata Usaha UPTB-UPPD Kabupaten Bima



Foto Bersama Kasi Pendataan dan Penetapan UPTB-UPPD Kabupaten Bima



Foto Bersama Kasubag Tata Usaha dan Kasi Pendataan dan Penetapan UPTB-UPPD Kabupaten Bima